

# PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SECARA NYATA GOOD GOVERNANCE

Ketua Umum PP PERSADI  
Pada Seminar Nasional PERSADI  
Pekanbaru, 16 Juni 2007

1

## I. PENDAHULUAN

- Krisis Ekonomi dan Krisis Politik
- Tuntutan Reformasi dan Paradigma Baru Indonesia



2

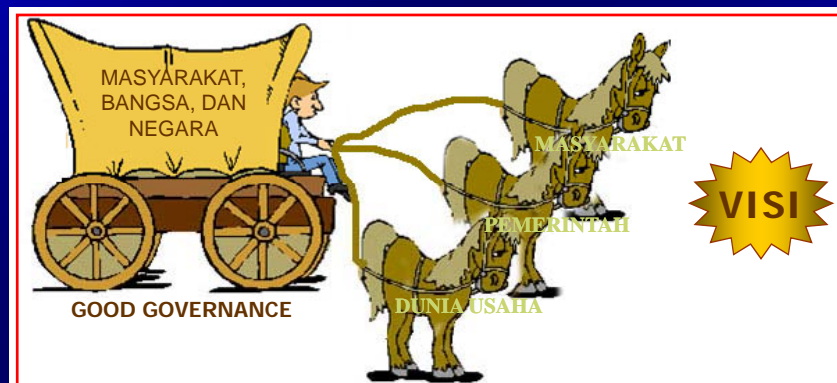
## DEFINISI GOVERNANCE

- THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION'S AFFAIRS (THE WORLD BANK)
- THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATION'S AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP)
- THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY'S SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA)
- KEPEMERINTAHAN

3

## KONSEP DASAR GOOD GOVERNANCE :

- SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF.
- SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA, DAN MASYARAKAT.



4

<b>KARAKTERISTIK <i>GOOD GOVERNANCE</i></b> <b>(World Bank)</b>	<b>CIRI <i>GOOD GOVERNANCE</i></b> <b>(Bappenas)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ layanan publik yang efisien;</li> <li>■ sistem yudisial yang bebas;</li> <li>■ penghormatan atas hukum dan hak azasi manusia disemua tingkat pemerintahan, dan penegakkannya;</li> <li>■ akuntabilitas penggunaan dana-dana politik;</li> <li>■ sistem pengawasan (auditor) publik yang independen;</li> <li>■ pertanggungjawaban terhadap lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat.</li> <li>■ struktur kelembagaan yang pluralistik;</li> <li>■ pers yang bebas;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visionary</li> <li>■ Openness and transparency</li> <li>■ Participation</li> <li>■ Accountability</li> <li>■ Rule of law</li> <li>■ Democracy</li> <li>■ Profesionalism and competency</li> <li>■ Responsiveness</li> <li>■ Efficiency and Effectiveness</li> <li>■ Decentralization</li> <li>■ Private sector and civil society partnership</li> <li>■ Commitment to reduce inequality</li> <li>■ Commitment to environmental protection</li> <li>■ Commitment to fair market</li> </ul>

5

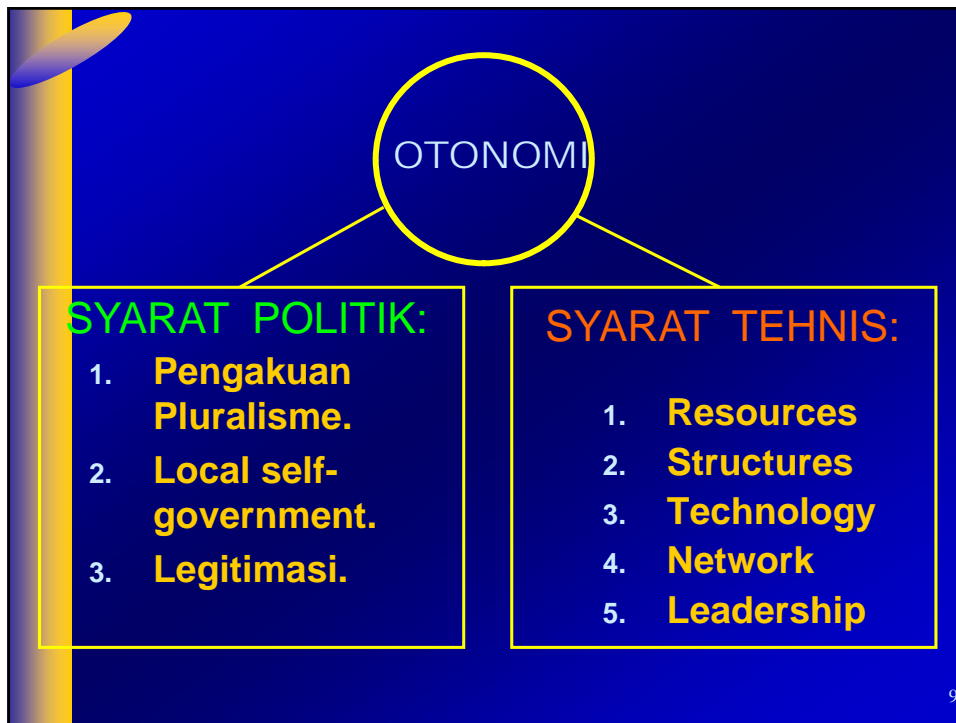
## NILAI DASAR GOVERNANCE



- DEMOCRACY
- DEVOLUTION
- DECENTRALIZATION
- PARTICIPATION
- DISAGGREGATION
- DIFFERENTIATION
- ACCOUNTABILITY

6





ARAH *DESENTRALISASI POLITIK* UNTUK WARGA DAN WAKIL RAKYAT LEBIH MEMILIKI KEKUASAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK. KONSEPNYA ADALAH UTK LEBIH MEMBERIKAN POWER KEBIJAKAN DAN LEGISLASI KEPADA DPRD dan WARGA (Seldar Yilmaz, 2004)

*DESENTRALISASI ADMINISTRASI*  
UNTUK REDISTRIBUSI  
AUTHORITY, RESPONSIBILITY,  
dan FINANCIAL RESOURCES  
DIANTARA STRATA  
PEMERINTAHAN (bisa fungsional  
bisa struktural)

(Rondinelli, 1999).

KONSEKWENSI PENYELENGGARAAN  
KEBIJAKAN DESENTRALISASI

- a. TERBENTUKNYA DAERAH OTONOM;
- b. TERWUJUDNYA OTONOMI DAERAH;
- c. TERCIPTANYA HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH; DAN ANTAR DAERAH DENGAN SIFAT :
  - 1) *HUBUNGAN KEWILAYAHAN;*
  - 2) *HUBUNGAN KEWENANGAN/FUNGSI;*
  - 3) *HUBUNGAN ADMINISTRASI DAN ORGANISASI;*
  - 4) *HUBUNGAN KEUANGAN; DAN*
  - 5) *HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA.*

12

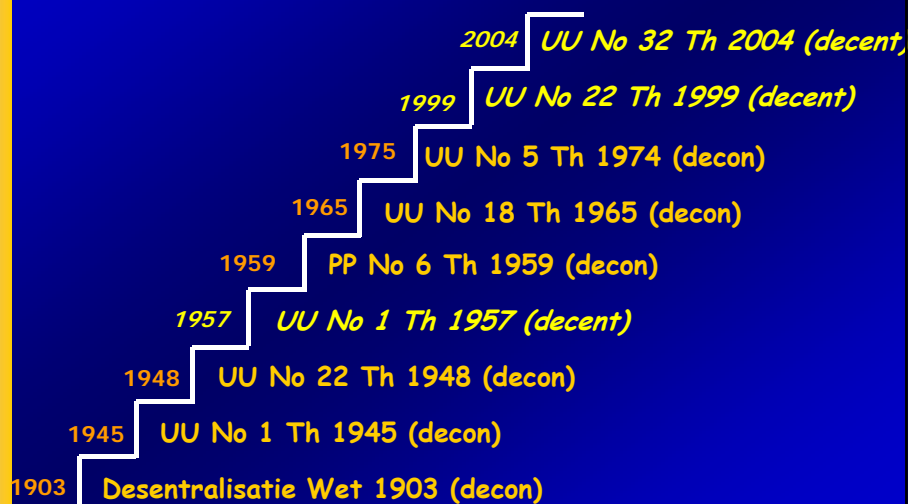
## BENTUK-BENTUK DISTRIBUSI POWER (DESENTRALISASI)

1. DEKONSENTRASI (INTERFACE Dengan DESENTRALISASI)
2. DELEGASI
3. DEVOLUSI

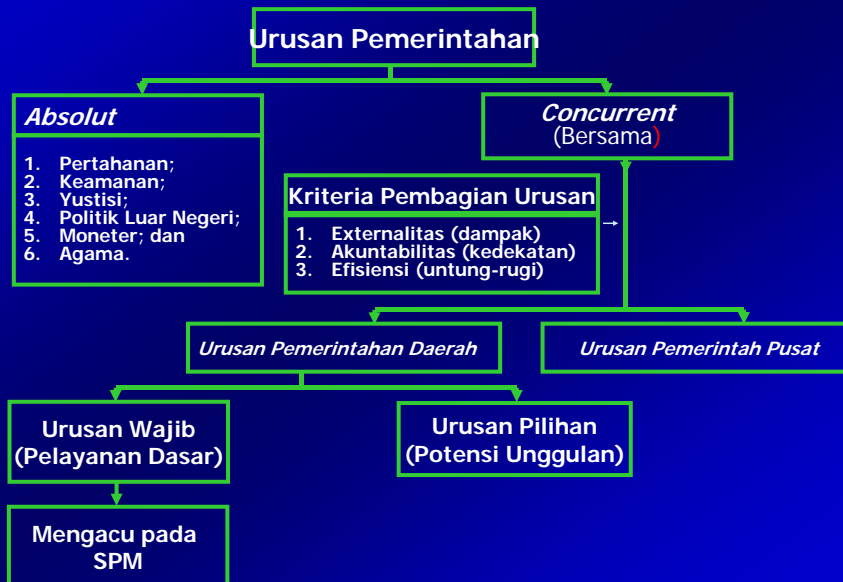
(Serdar Yilmaz, 2004)

4. PRIVATISASI (Bennet, 1994)

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN D & OD (NORMATIVE)



## PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)



15

## UPAYA PELEMBAGAAN DENGAN UNSUR-UNSUR :

- SISTEM NILAI
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN
- INTERAKSI/KOMUNIKASI
- INFORMASI DAN TEKNOLOGI
- DAYA LENTUR VS PERUBAHAN (AKOMODASI)
- SUMBERDAYA
- ORGANISASI DAN HIRARKI
- TIM/SDM DENGAN VISI DAN VITALITASNYA
- BIAYA TRANSAKSI
- NET WORKING
- KOLABORATIF STAKEHOLDERS

16

## ELEMEN DINAMIK

- PARTISIPASI MASYARAKAT
- GERAKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
- KEMITRAAN DAN KEBUTUHAN AKAN KETERBUKAAN PEMERINTAH

17

## PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI UU 32 / 2004

- FUNDAMENTAL
- STRUKTURAL
- POLITIS
- SOSIAL BUDAYA

18

## URAIAN MASALAH

### Masalah-masalah Fundamental :

- Meskipun merupakan amanat konstitusi, namun penjabarannya belum sempurna
- Nilai-nilai pemerintahan dan kemasyarakatan (lihat sejarah perjalanan desentralisasi menurut UU-nya, rata-rata dekonsentrasi, jadi ada spirit yang dominan.
- Indikasi nilai-nilai feodalistik yang seperti melekat erat pada kultur bangsa (cirinya mau menang sendiri dan sulit untuk sharing )

19

### Masalah-masalah Struktural :

- pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan daerah masih belum tuntas  
contohnya, semua undang-undang sektoral masih bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah
- Keberadaan Struktur departemen yang mempertahankan kewenangan serta kontradiksi perundangan (sektor kehutanan, pertanian, dll).
- Keberadaan sistem pemda yang selalu menunggu juklak-juknis.
- Tidak ada guidance yang continuous dan consistent (kurangnya PP dll sebagai aturan pelaksanaan UU 32/2004).
- Lemahnya inisiatif dan inovasi di kalangan Pemda
- Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat.

20

## Masalah-Masalah Politis :

- Political Behaviour  
(mix up antara eksekutif dan legislatif)
- Arogansi sektor (pusat)
- Arogansi kedaerahan (dalam penentuan pejabat, dll)

## Masalah-Masalah Sosial Budaya:

- Keragaman budaya dan sosial menyulitkan pengaturan secara cepat dan mengakibatkan masalah yang beragam menurut daerah

21

## CONCLUDING REMARKS



22

- Masalah ada di tingkat pusat ? Provinsi ? Kabupaten/kota ?
- Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ? Politisi ?
- Simpul masalah struktural atau fundamental ?

→ Mungkin lebih bersifat Fundamental ?

23

OTONOMI  
DAERAH



DEWAN  
PERWAKILAN  
DAERAH

24

## DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN DPD

- Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.
- Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah.
- Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional.
- Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.
- Mengawal otonomi daerah.

25



**TERIMA KASIH**

26 26